

BAB IV
IMPLEMENTASI SPP (SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN)
DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT

A. Implementasi SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) di Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian dana bergulir kepada kelompok perempuan dalam mengembangkan usaha mikro yaitu dengan memberikan akses permodalan yang dibutuhkan oleh pengusaha mikro dan golongan ekonomi lemah secara luas, mudah dan murah.

Desa Tungu adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, yang masyarakatnya sebagian besar bermatapencarian sebagai petani. Karena bermatapencarian sebagai petani, masyarakat Desa Tungu hanya mengandalkan lahan sawah yang menjadi fondasi dalam kehidupannya. Apabila sawah yang diandalkan tersebut tidak mampu menghasilkan apa yang dituju oleh masyarakat, maka kehidupan perekonomian mereka dalam memenuhi kebutuhan akan terganggu.

Dengan kehadiran SPP di Desa Tungu, kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki diharapkan akan semakin baik, sehingga berpengaruh pula terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi untuk memupuk modal sangat penting

mengingat bahwa kegiatan simpan pinjam ini merupakan roda utama dalam kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat diberi modal untuk dikembangkan secara mandiri dan berkelanjutan yang tujuan utamanya adalah untuk penanggulangan kemiskinan.

Munculnya SPP sebagai salah satu program dari PNPM Mandiri Perdesaan yaitu SPP sebagai bentuk partisipasi dari kaum perempuan dan mengelola simpan pinjam di kelompok. Sebelum adanya SPP, ada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang beranggotakan kaum laki-laki dan perempuan dengan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Dalam kegiatan UEP, proses peminjaman bisa dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi dalam pengelolaannya kaum laki-laki tidak bisa mengelola pinjaman dengan baik, sehingga dalam proses pengembalian pinjaman mengalami kesulitan. Sehingga sekarang ini UEP digantikan dengan SPP, karena simpan pinjam untuk perempuan kebanyakan para perempuan mempunyai dasar untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga dan juga perempuan lebih teliti dan lebih tertata dalam pengelolaan keuangan.¹

Pada dasarnya simpan pinjam merupakan suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi gerakan rentenir yang merugikan masyarakat.²

¹ Wawancara kepada bapak Erwin selaku fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan, 30/6/2014 pukul 10.45 WIB.

² Lisafitri2008.blogspot.com/2008.html?m=1. Diakses pada tanggal 1 Juli 2014 pukul 15.52 WIB.

Pinjaman adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.³ Jadi simpan pinjam merupakan suatu usaha yang memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyimpan dan meminjam uang dengan mudah untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Adanya kegiatan simpan pinjam bertujuan untuk membantu masyarakat agar keluar dari angka kemiskinan. Sumber kemiskinan merupakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar karena terbatasnya sarana dan prasarana sosial ekonomi serta rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal bagi masyarakat. Kurangnya dana untuk permodalan usaha akan menghambat perkembangan usaha yang telah dilakukan, sehingga mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat. Akibatnya bila tidak segera diatasi akan menjadi keterpurukan ekonomi yang menimbulkan keresahan di bidang pangan, kesehatan dan pendidikan, bahkan bisa terjadinya kemiskinan.

Didalam observasi yang penulis lakukan, peran pengelola dalam pengelolaan dana SPP sangatlah penting, karena tanpa adanya pengelola, kegiatan SPP ini tidak akan berjalan dengan lancar. Adapun peran pengelola antara lain:

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 92.

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana SPP yang dialokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif;
2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi, baik keuangan maupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan SPP;
3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen SPP;
4. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
5. Melakukan sosialisasi dalam perencanaan keuangan (peminjaman) dan rencana kerja (pengembalian) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
6. Membantu pengembangan kapasitas pelaku-pelaku usaha dalam kelompok melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan;
7. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan peminjaman, pengembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan penyampaian secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.

Tabel 4.1 Data Jumlah Pinjaman SPP kelompok Melati

No.	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman
1.	Mimik Mulyani	Dagang	Rp 2.000.000,-
2.	Parimah	Dagang	Rp 2.000.000,-
3.	Masmah	Dagang	Rp 1.000.000,-
4.	Ummu Sholekah	Dagang	Rp 2.000.000,-
5.	Musrikah	Dagang	Rp 1.000.000,-

6.	Kanah	Dagang	Rp 2.000.000,-
7	Dumiasih	Dagang	Rp 1.000.000,-
8.	Nartiah	Dagang	Rp 2.000.000,-
9.	Hartini	Dagang	Rp 2.000.000,-
10.	Suwarni	Dagang	Rp 2.000.000,-
11.	Umu Kalsum	Dagang	Rp 2.000.000,-
12.	Osin Osbun	Dagang	Rp 1.000.000,-
	Jumlah		Rp 20.000.000,-

Sumber: Proposal Usulan Kelompok Melati Desa Tungu Tahun 2013

Tabel 4.2 Data Jumlah Pinjaman SPP kelompok Mawar

No.	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman
1.	Dewi Puspita	Dagang	Rp 2.000.000,-
2.	Suyati	Dagang	Rp 3.000.000,-
3.	Sumiyati	Dagang	Rp 3.000.000,-
4.	Laswati	Dagang	Rp 2.000.000,-
5.	Sri Umini	Dagang	Rp 1.000.000,-
6.	Siti Azizah	Dagang	Rp 2.000.000,-
7.	Sayuk	Dagang	Rp 3.000.000,-
8.	Yuliana	Dagang	Rp 3.000.000,-
9.	Sukati	Dagang	Rp 2.000.000,-
10.	Munazilah	Dagang	Rp 2.000.000,-

11.	Purwati	Dagang	Rp 2.000.000,-
12.	Sumyati	Dagang	Rp 3.000.000,-
13.	Suwarni	Dagang	Rp 2.000.000,-
14.	Rohmi	Dagang	Rp 1.000.000,-
	Jumlah		Rp 31.000.000,-

Sumber: Proposal Usulan Kelompok Mawar Desa Tunggu Tahun 2013

Berdasarkan data dari kedua tabel diatas, dapat diketahui bahwa pemberian dana kepada masing-masing kelompok disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan pengajuan pinjaman per anggota. Adapun pengajuan pinjaman tidak boleh melebihi batas maksimum dari jumlah pinjaman yang dialokasikan serta disesuaikan dengan lamanya kelompok dibentuk yaitu kelompok baru pinjaman awal sebesar Rp 1.000.000,-. Dan penulis juga dapat menyimpulkan bahwa kelompok SPP yang ada di Desa Tunggu baik kelompok Melati maupun kelompok Mawar, jenis usaha mereka semuanya berdagang dan rata-rata maksimal peminjaman sebesar Rp 3.000.000,-. Semakin besar dana pinjaman yang mereka ajukan, maka semakin besar pula suku bunga yang harus mereka bayar.

Dari observasi yang penulis lakukan, program SPP PNPM-MP di desa Tunggu adalah kegiatan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemajuan perekonomian masyarakat. Pemberian dana SPP ini memberikan banyak manfaat bagi penerima pinjaman yang ada di desa Tunggu. Ini dikarenakan syarat yang perlu dipenuhi tidak serumit yang diajukan oleh pihak bank.

Dalam peminjaman dana SPP tidak memberikan jaminan kepada UPK seperti pada bank, tetapi dengan memberikan jaminan kepada kelompok yang dipegang oleh ketua kelompok yang disebut sebagai tanggung renteng.⁴ Pelaksanaan SPP di desa Tungu sudah sesuai dengan apa yang ada di Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Terbukti dengan memilih rumah tangga miskin sebagai sasaran utamanya dan syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman dana SPP sesuai dengan yang ada di PTO.

Dana yang dipinjamkan kepada kelompok SPP terdiri dari dua macam, yaitu dana reguler dan dana perguliran. Dana reguler adalah dana yang didapat dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk tahun berjalan, dana setelah pengembaliannya dana tersebut masuk menjadi dana perguliran untuk dipinjamkan kepada kelompok perguliran. Peminjaman dana SPP di desa Tungu berjalan cukup baik, walaupun terkadang terjadi tunggakan di salah satu anggota kelompok. Namun tunggakan tersebut dapat diselesaikan dengan memberikan batas waktu maksimal pembayaran.

Sasaran utama pada program SPP di desa Tungu juga sudah sesuai dengan ketentuan SPP yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang produktif. Masyarakat dapat memanfaatkan pinjaman dana SPP yang sudah didapat dengan baik. Melalui pinjaman dana SPP tersebut banyak roda perekonomian yang dapat dijalankan dan dikembangkan. Disamping itu, pihak pengelola SPP juga ikut serta mendampingi masyarakat yang

⁴ Wawancara dengan bapak Eko Budi Santoso selaku ketua UPK di Kecamatan Godong, 30/6/2014 pukul 11.05 WIB.

mengajukan pinjaman agar dapat menggunakan dana pinjamannya untuk mengembangkan usaha, meningkatkan taraf kehidupan keluarga dan memperbaiki pengaturan keuangan rumah tangga. Dengan demikian, pinjaman dana SPP ini dapat dibayar kembali secara lancar sambil tetap memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan ekonomi masyarakat desa Tunggu.

B. Pengaruh Program SPP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim.

Pemberdayaan adalah proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan. Ada pula pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.⁵

Melalui SPP PNPM-MP dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian dana bergulir yang melibatkan masyarakat yaitu dari kaum perempuan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantau dan evaluasi. Melalui proses

⁵ Endang Sutisna Sulaeman, *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012, hlm. 94-95.

pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian perempuan, terutama Rumah Tangga Miskin (RTM) produktif dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan.

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Oleh sebab itu, setiap program yang dilaksanakan tentu saja bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah kondisi yang ada menjadi kondisi yang lebih baik dan dapat menguntungkan semua pihak yaitu pemerintah sebagai penyedia dana dan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran.

Berdasarkan beberapa wawancara penulis dengan salah satu anggota kelompok Melati dan Mawar pada BAB III, dapat diketahui bahwa sebelum adanya pinjaman dana SPP, usaha masyarakat hanya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga masyarakat sangat kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Setelah adanya SPP, masyarakat sangat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan dan pengembangan usaha yang mereka jalani. Mereka juga berharap agar kegiatan simpan pinjam seperti ini tetap berlanjut sehingga dapat membantu dan menyadarkan bagi masyarakat miskin lainnya. Peminjaman dana SPP sebagai salah satu program dari PNPM Mandiri Perdesaan dapat membantu perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yang produktif.

Jika dikaji dalam konsep pemberdayaan, dengan munculnya SPP di Desa Tunggu masyarakat miskin berjalan dengan efektif sehingga

masyarakat bisa berdaya dan berkembang, hal tersebut bisa dilihat dari peningkatan pendapatan yang mereka peroleh. Pemberdayaan masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, akan tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan itu sendiri.

Pada dasarnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah kebijakan dalam suatu program yang telah lama dikembangkan pemerintah dalam bentuk membantu ekonomi masyarakat sebagai kegiatan produksi bukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan permodalan kecil yang mudah dan murah tanpa jaminan fisik.

Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dibutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak khususnya pemerintah dan masyarakat yang mengelola. Dengan kerjasama tersebut maka pelaksanaan program ini akan berjalan dengan baik, lancar dan tepat sasaran yang akhirnya kesejahteraanpun akan mudah terwujud.

Dengan adanya program SPP, suatu pemberdayaan sudah di rasakan oleh masyarakat miskin di desa Tungu, keberlangsungan hidup yang sejahtera dan tercapainya kebutuhan pemenuhan kebutuhan dalam

perekonomian keluarga maupun dalam usaha yang mereka jalani. Sehingga masyarakat mengharapkan agar program semacam ini tetap berjalan dengan baik dan terus berlangsung agar dapat mengentaskan kemiskinan pada masyarakat lainnya.